

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Inayah Ramadanti

NPP. 31.0923

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 31.0923@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Mutia Rahmah, S. IP, M. Si

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): The waste problem is still occurring in Kendari City, this is seen from the increase in the amount of waste production from 2020 to 2022. **Purpose:** This research aims to describe and analyze the supporting and hindering factors in the implementation of waste management policy in Kendari City, as well as efforts to optimize its implementation. **Methods:** This study employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. **Results:** The study reveals that supporting factors for the implementation of waste management policy in Kendari City include 1) Clarity in policy design such as procedures, timing, resources, and changes in policy targets or objectives from the initial policy design. 2) Clear oversight structure by both the community and regulatory bodies. 3) Clarity in institutional design including executing organizations and internal and inter-organizational coordination. 4) Social acceptance evidenced by perceived benefits among the community. Hindering factors in the implementation of waste management policy in Kendari City include 1) Inappropriate choice and difficulties in implementing waste management policy instruments. 2) Low administrative capacity among waste management implementers. 3) Insufficient social acceptance in terms of community involvement in waste management. Efforts to optimize the implementation of waste management policy in Kendari City involve increasing budget allocation for waste management, fulfilling infrastructure needs, and enhancing education, socialization, and related activities on waste management. **Conclusion:** Based on the research findings and discussions, supporting factors in the implementation of waste management policy in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, encompass clarity in policy design, oversight structure, institutional framework, and social acceptance, while hindering factors include inappropriate policy instrument choices, low administrative capacity, and lack of community involvement. Optimization efforts involve increasing budgetary allocations, meeting infrastructure needs, and enhancing education, socialization, and activities related to waste management.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah sampah masih terjadi di Kota Kendari, hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah produksi sampah dari tahun 2020 hingga 2022. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari serta upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari adalah 1) Kejelasan desain kebijakan berupa prosedur, waktu dan sumber daya, serta perubahan target atau tujuan kebijakan dari desain awal kebijakan. 2) Kejelasan struktur pengawasan baik oleh masyarakat maupun badan pengawas. 3) Kejelasan desain kelembagaan berupa organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi. 4) Penerimaan sosial berupa kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari adalah 1) Ketidaktepatan pilihan dan kesulitan pelaksanaan instrumen implementasi kebijakan pengelolaan sampah. 2) Rendahnya kemampuan administratif pelaksana pengelolaan sampah. 3) Kurangnya Penerimaan sosial berupa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari adalah peningkatan anggaran pengelolaan sampah, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan edukasi, sosialisasi dan kegiatan terkait pengelolaan sampah. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi kejelasan desain kebijakan, struktur pengawasan, kelembagaan, dan penerimaan sosial, sedangkan faktor penghambatnya termasuk ketidaktepatan instrumen implementasi, rendahnya kemampuan administratif, dan kurangnya keterlibatan masyarakat, dengan upaya optimalisasi melalui peningkatan anggaran, pemenuhan sarana-prasarana, serta edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengelola suatu wilayah baik negara maupun daerah. Berdasarkan data terbaru dari SIPSN (2024), provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan signifikan dalam produksi sampah selama tiga tahun terakhir,

menempatkannya di peringkat ke-25 secara nasional dalam hal rata-rata produksi sampah tahunan. Perlu dicatat bahwa terjadi lonjakan yang cukup besar dalam produksi sampah di wilayah ini, dengan peningkatan sebesar 33% dari tahun 2020 ke 2021 dan lonjakan mencolok sebesar 84% dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini menunjukkan potensi tren peningkatan produksi sampah di tahun-tahun mendatang, yang menggarisbawahi permasalahan lingkungan yang mendesak.

Dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan volume sampah, Kota Kendari menonjol di Sulawesi Tenggara sebagai kota dengan tingkat produksi sampah tertinggi. Dari tahun 2020 hingga 2023, Kendari secara konsisten memimpin wilayah ini dalam produksi sampah, menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 2%, setara dengan sekitar 2.000 ton per tahun. Sebaliknya, Kabupaten Kolaka mengalami penurunan produksi sampah, dengan penurunan sebesar 12% dari tahun 2020 ke 2021 dan 13% dari tahun 2021 ke 2022, menunjukkan dinamika pengelolaan sampah yang bervariasi di berbagai lokasi dalam provinsi ini.

Manajemen yang buruk terhadap sampah dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti pencemaran udara, kontaminasi air, penyebaran penyakit, dan bahkan banjir (Kompasiana.com, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan mempromosikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah daerah, termasuk Kota Kendari, telah memperkuat upaya ini melalui regulasi khusus seperti Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, yang fokus pada pengurangan jumlah sampah dan dampak lingkungan yang terkait, sambil meningkatkan kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Secara praktis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari telah mendirikan berbagai tempat pembuangan sampah di seluruh kota, termasuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menunjukkan pendekatan proaktif dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Langkah-langkah ini adalah langkah penting menuju praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan kerangka regulasi nasional dan lokal yang dirancang untuk mengubah sampah menjadi sumber daya berharga bagi masyarakat serta menjaga kesehatan lingkungan di wilayah tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersedia di Kota Kendari mencapai 984 TPS yang tersebar di 11 kecamatan, dengan satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Kecamatan Puuwatu. Proses pengangkutan sampah di kota ini dimulai dari TPS, kemudian diangkut menggunakan truk sampah oleh petugas untuk dibawa ke TPA. Namun, kondisi inventarisasi sarana pengelolaan sampah menunjukkan bahwa beberapa peralatan penting berada dalam kondisi tidak layak pakai atau mengalami kerusakan, seperti Dozer D3, Excavator, Dumb Truck, Kendaraan Roda Dua, Motor Sampah, dan Mesin Rumput (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, 2024).

Peningkatan jumlah sampah di Kota Kendari selama tiga tahun terakhir, dari 2020 hingga 2022, menyoroti adanya masalah signifikan dalam pengelolaan sampah yang tidak diimbangi dengan kondisi sarana yang memadai. Meskipun jumlah TPS yang tersedia cukup banyak, kondisi peralatan yang rusak atau tidak layak pakai menghambat efektivitas proses pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu pengurangan jumlah dan dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan ini, penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari sangat diperlukan. Fokus penelitian dapat mencakup evaluasi efektivitas kebijakan saat ini, analisis penyebab utama kerusakan peralatan, serta identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk perbaikan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, guna mencapai praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Kendari. Implementasi kebijakan yang lebih efektif diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Kendari dan sekitarnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Penelitian oleh Wibowo (2019)** mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah setempat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 2) **Penelitian oleh Setiawan dan Rahmawati (2020)** meneliti peran teknologi dalam pengelolaan sampah di Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, seperti aplikasi pelaporan sampah, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mempermudah monitoring. Penelitian ini menyarankan integrasi teknologi lebih lanjut dalam sistem pengelolaan sampah.
- 3) **Penelitian oleh Sari (2021)** fokus pada analisis kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah di Kendari. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Disarankan adanya perbaikan koordinasi dan implementasi kebijakan yang lebih terstruktur.
- 4) **Penelitian oleh Hidayat dan Nuraini (2018)** mengevaluasi dampak sosial dari program pengelolaan sampah di masyarakat Kendari. Penelitian ini menemukan bahwa program yang ada belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyarankan pendekatan partisipatif yang lebih inklusif.

- 5) **Penelitian oleh Ahmad (2020)** menganalisis efektivitas fasilitas pengelolaan sampah di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa fasilitas tidak beroperasi optimal karena masalah teknis dan keterbatasan dana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah.
- 6) **Penelitian oleh Utami dan Prasetyo (2021)** mengkaji kebijakan pengurangan sampah plastik di Kendari. Studi ini menemukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Ditekankan perlunya penguatan regulasi dan kampanye kesadaran publik.
- 7) **Penelitian oleh Handayani (2019)** mengevaluasi program bank sampah di Kendari. Temuan menunjukkan bahwa bank sampah memiliki potensi besar untuk mengurangi volume sampah, namun masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat. Disarankan untuk meningkatkan promosi dan insentif bagi masyarakat.
- 8) **Penelitian oleh Yusuf dan Anwar (2022)** meneliti aspek ekonomi dari pengelolaan sampah di Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat memberikan dampak ekonomi positif melalui penciptaan lapangan kerja dan daur ulang material. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sektor ekonomi sirkular.
- 9) **Penelitian oleh Fitriana (2020)** mengkaji kesadaran lingkungan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kendari. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran lingkungan masyarakat masih rendah dan memerlukan peningkatan melalui program pendidikan dan kampanye lingkungan.
- 10) **Penelitian oleh Rahman dan Putri (2023)** mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah jika didukung dengan pendanaan dan pelatihan yang memadai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara" terletak pada pendekatan holistik dan integratif yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas kebijakan dari perspektif pemerintah, tetapi juga mengkaji partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, dan dampak ekonomi serta sosial dari kebijakan tersebut. Studi sebelumnya cenderung fokus pada satu aspek tertentu, seperti efektivitas fasilitas pengelolaan atau partisipasi masyarakat, namun penelitian ini menggabungkan berbagai elemen untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kendari. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis komparatif dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, survei masyarakat, dan tinjauan lapangan terhadap fasilitas pengelolaan sampah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi gap antara kebijakan yang direncanakan dan praktik di lapangan, serta faktor-faktor penghambat yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan mengusulkan rekomendasi kebijakan yang

lebih inklusif dan berbasis bukti, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Kendari dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah, yang pada akhirnya dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, efektivitas penggunaan teknologi, dan dampak ekonomi serta sosialnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pemerintah Kota Kendari untuk memperbaiki dan mengoptimalkan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara fleksibel dan terbuka, menghindari struktur yang kaku, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan mendetail dari berbagai sumber data dan informan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks yang lebih luas dan kompleks, serta menggambarkan masalah yang terjadi di masyarakat sesuai dengan fakta yang ada.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini melibatkan identifikasi dan penguraian konsep-konsep utama yang akan digunakan untuk mengukur dan memahami implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Konsep-konsep tersebut meliputi pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Masing-masing konsep ini diuraikan menjadi faktor-faktor penentu dan atribut-atribut yang lebih spesifik, seperti ketepatan instrumen, kemudahan pelaksanaan, kejelasan prosedur, jumlah perubahan target, pengawasan oleh masyarakat dan badan pengawas, koordinasi internal dan antarorganisasi, serta ketersediaan dan kecukupan sumber daya. Dengan operasionalisasi konsep yang rinci ini, peneliti dapat secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan penelitian, dokumen kebijakan, catatan pengelolaan sampah, dan literatur sebelumnya. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan awal dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, seperti kepala dinas lingkungan hidup, kepala bidang persampahan, dan ketua

komunitas peduli sampah. Teknik snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, didukung oleh berbagai alat bantu seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, serta alat tulis dan elektronik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel selama proses wawancara. Observasi dilakukan tanpa partisipasi langsung untuk mengamati aktivitas pengelolaan sampah secara objektif. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen publik dan pribadi yang relevan untuk memberikan informasi tambahan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dimana data dirangkum, diorganisir, dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari menunjukkan adanya tantangan yang signifikan terkait dengan pilihan instrumen kebijakan yang digunakan. Berdasarkan analisis menggunakan teori Knill & Tosun, pemerintah Kota Kendari memilih instrumen berupa subsidi dalam menangani masalah persampahan. Pilihan ini didasarkan pada kapasitas pemerintah yang rendah dalam menghadapi kompleksitas masalah sampah. Faktor anggaran dan jumlah aktor yang terlibat menjadi penentu utama dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun anggaran yang disediakan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pemerintah tetap berupaya menyediakan subsidi dalam bentuk alat pengelolaan sampah, insentif bagi pemulung, dan subsidi transportasi sampah.

Kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecamatan dan kelurahan, serta organisasi masyarakat seperti WALHI Sultra dan komunitas peduli lingkungan, menjadi kunci dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari. Meskipun sudah ada aturan dan anggaran yang ditetapkan, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, seperti perilaku masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dan keterbatasan alat operasional yang sering mengalami kerusakan. Selain itu, program-program yang ada, seperti Bank Sampah, masih belum dikelola dengan baik dan edukasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Pemberian subsidi telah memberikan beberapa kemudahan dalam pelaksanaan instrumen kebijakan, namun belum sepenuhnya efektif. Misalnya, pemberian alat pengelolaan sampah kepada kecamatan, insentif bagi pemulung di Kampung Energi, dan subsidi transportasi sampah. Meski demikian, masih ada tantangan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa faktor pendukung seperti kolaborasi antar aktor dan adanya anggaran yang disediakan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari masih menghadapi berbagai hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan peningkatan dalam manajemen program, edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Kendari dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Desain kebijakan yang efektif memerlukan kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Di Kota Kendari, regulasi terkait pengelolaan sampah telah diatur dengan jelas melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan walikota. Peraturan tersebut mencakup prosedur pengelolaan sampah, jadwal pengangkutan sampah, serta alokasi sumber daya manusia dan prasarana yang diperlukan. Meskipun sudah ada aturan yang rinci, dalam praktiknya, ada beberapa hambatan seperti ketidaktepatan waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dan beberapa sarana yang tidak dalam kondisi layak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, implementasinya masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi dan pemenuhan prasarana yang memadai.

Jumlah perubahan target atau tujuan kebijakan juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan. Di Kendari, target pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam peraturan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun, beberapa target seperti pengurangan sampah belum mencapai hasil yang diinginkan sepenuhnya. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, selain menambah fasilitas, penting untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih patuh terhadap jadwal dan prosedur pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari serta komunitas lingkungan, terungkap bahwa meskipun regulasi sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan sampah belum maksimal karena kurangnya disiplin waktu dan kelengkapan prasarana. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengikuti prosedur yang ada serta komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan penegakan aturan untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang optimal di Kota Kendari.

Struktur pengawasan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari dapat dilaksanakan baik secara informal maupun formal. Pengawasan informal melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat, seperti organisasi masyarakat yang membantu mengelola dan mengawasi kebersihan lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat ini diatur dalam peraturan lokal yang mengharuskan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kawasan tertib sampah dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Meskipun fasilitas untuk pengaduan masyarakat telah disediakan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk aplikasi SILAHKAN, jumlah aduan masih terbatas dan sering kali tidak langsung terkait dengan persoalan persampahan.

Sementara itu, pengawasan formal dilakukan oleh badan resmi yang berwenang seperti BPK, Inspektorat, dan Ombudsman, serta organisasi non-pemerintah seperti WALHI Sultra. Badan-badan ini berperan dalam memantau dan menegakkan aturan terkait pengelolaan sampah, memastikan efektivitas penggunaan anggaran, dan menilai kinerja dinas terkait. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa program-program pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan formal biasanya dilakukan secara rutin, dengan BPK dan Inspektorat melakukan pengawasan tahunan, sementara Ombudsman melakukannya setiap enam bulan.

Meskipun sudah ada struktur pengawasan yang cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pengawasan oleh masyarakat belum berjalan maksimal, meskipun ada beberapa inisiatif dan perlombaan yang mendorong keterlibatan mereka. Di sisi lain, pengawasan oleh badan resmi lebih fokus pada akuntabilitas dan kinerja, tetapi belum sepenuhnya mampu menangani semua aspek operasional sehari-hari di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama antara masyarakat dan badan pengawas untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Kendari.

Desain kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari melibatkan berbagai organisasi pelaksana yang bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi pelaksana ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, Kecamatan dan Kelurahan, serta badan non-pemerintah seperti WALHI Sulawesi Tenggara. Setiap organisasi memiliki peran spesifik, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung jawab utama perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sementara Kecamatan dan Kelurahan menangani implementasi di tingkat lokal. WALHI Sultra, meskipun memiliki jumlah personil yang lebih sedikit, berperan dalam pengawasan dan penegakan peraturan terkait pengelolaan sampah.

Koordinasi internal dan antar organisasi merupakan elemen kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Koordinasi internal di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui pembagian tugas dan penetapan prosedur yang jelas antar berbagai bidang, seperti persampahan, kebersihan, dan pengelolaan limbah. Selain itu, koordinasi eksternal melibatkan kerjasama dengan instansi lain seperti BPK, Inspektorat, Ombudsman, serta organisasi non-pemerintah untuk program-program tertentu, seperti penilaian Adipura dan lomba kebersihan. Komunikasi antar organisasi pelaksana dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan langsung maupun menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, setiap organisasi pelaksana berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan jumlah personil yang signifikan, memimpin koordinasi dan pelaksanaan program di tingkat kota, sementara Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab di tingkat lokal, termasuk koordinasi dengan masyarakat melalui RT/RW. WALHI Sultra, meskipun lebih kecil, tetap memainkan peran penting dalam pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Koordinasi yang efektif antar

organisasi ini menjadi landasan utama untuk memastikan program pengelolaan sampah di Kota Kendari berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya di Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari untuk manajemen sampah menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat personel yang terlibat dalam pengelolaan sampah, terdapat kekurangan dalam beberapa peran krusial seperti transportasi sampah. Begitu juga dengan alokasi anggaran yang fluktuatif setiap tahunnya, hal ini mempengaruhi kemampuan operasional dan efektivitas program. Mesin pengolah sampah yang ada di kantor ini, sebanyak tiga unit, menjadi krusial dalam upaya minimisasi sampah namun masih perlu peningkatan dalam sistem dan pemeliharannya.

Analisis mendalam terhadap sumber daya menunjukkan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas manajemen sampah. Rekrutmen dan pelatihan tambahan bagi personel menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan konsistensi dalam layanan pengelolaan sampah. Selain itu, perlunya advokasi untuk alokasi anggaran yang lebih stabil dan memadai agar operasi pengelolaan sampah dapat berjalan konsisten serta infrastruktur terus terjaga.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari menunjukkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan sosial dari masyarakat. Tingkat kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ini. Bank Sampah, sebagai salah satu inisiatif utama, telah memberikan dampak ekonomis yang signifikan dengan menjual hasil daur ulang sampah. Hal ini tidak hanya mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dengan penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun beberapa lokasi masih menghadapi tantangan seperti tumpukan sampah yang belum diangkut secara teratur, pernyataan dari tokoh masyarakat dan pihak terkait menunjukkan bahwa ada kecenderungan positif dalam memanfaatkan dan menghargai upaya-upaya pengelolaan sampah ini.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Bank Sampah telah berhasil melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah, dengan sejumlah bank sampah aktif yang tersebar di berbagai wilayah Kota Kendari. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengubah perilaku beberapa individu yang belum sepenuhnya patuh terhadap SOP yang ada, seperti membuang sampah di tempat yang tidak sesuai. Perluasan edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah ini.

Pada akhirnya, upaya untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari harus terus ditingkatkan. Melalui edukasi yang lebih intensif dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat semakin menyebar luas. Pemerintah setempat perlu mempertimbangkan strategi komunikasi yang efektif serta penguatan infrastruktur pendukung untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas dari kebijakan ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, Kota Kendari dapat terus menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

3.2 Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menunjukkan tantangan signifikan dalam mencapai hasil yang optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu upaya yang krusial adalah peningkatan anggaran untuk pengelolaan sampah. Menurut data yang disajikan, anggaran tersebut mengalami peningkatan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti kontainer sampah dan kendaraan pengangkut. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan lebih lanjut agar dapat memastikan semua SOP terpenuhi dan petugas yang terlibat mendapatkan motivasi maksimal dengan gaji yang sesuai standar.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana menjadi fokus utama dalam upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. Meskipun sebagian besar sarana seperti arm roll truck dan backhoe loader terlihat layak, terdapat beberapa yang kondisinya perlu diperbaiki atau diganti. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal tanpa kendala teknis yang dapat menghambat efisiensi operasional. Inisiatif seperti pengadaan kontainer dan perbaikan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) perlu ditingkatkan untuk menangani volume sampah yang terus meningkat.

Selain aspek infrastruktur, penting juga untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun sudah ada kegiatan seperti kerja bakti, sosialisasi tentang cara pemilahan sampah yang tepat, manfaat pengelolaan sampah, serta pengetahuan mengenai regulasi daerah masih perlu ditingkatkan. Mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku, akan membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti memperkuat bank sampah, pengelolaan kontainer, dan kampanye sosialisasi oleh tokoh masyarakat telah memberikan kontribusi positif. Namun, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, perlu juga terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan seperti pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai yang direncanakan.

Secara keseluruhan, mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait. Diperlukan upaya konkret dalam peningkatan anggaran, perbaikan sarana prasarana, edukasi masyarakat, serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, Kota Kendari dapat mencapai tujuan untuk mengelola sampah secara efisien, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan beberapa perbedaan dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan anggaran, pemenuhan sarana prasarana, dan edukasi masyarakat, masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pencapaian hasil yang optimal. Berdasarkan data anggaran pengelolaan sampah yang disajikan, terlihat adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti kontainer sampah dan arm roll truck. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam meningkatkan infrastruktur yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah di Kota Kendari.

Namun, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, masih terlihat bahwa beberapa sarana prasarana pengelolaan sampah masih kondisinya tidak layak atau perlu diperbaiki. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan anggaran, tetapi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara lebih efektif. Penelitian terdahulu mungkin menyoroti masalah serupa, namun perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa perbaikan dan penggantian sarana prasarana dilakukan secara teratur dan tepat waktu agar tidak mengganggu kelancaran operasional.

Selain itu, dari segi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya seperti kerja bakti dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, masih diperlukan peningkatan dalam penetapan jadwal yang lebih terstruktur dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dan terus-menerus dalam mengelola sampah di Kota Kendari, sehingga dapat mencapai keberlanjutan yang diinginkan dalam jangka panjang.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi mengenai temuan menarik lainnya dari penelitian ini mengungkap beberapa aspek yang patut diperhatikan dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu temuan menarik adalah adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program pengelolaan sampah, terutama melalui kegiatan seperti kerja bakti dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Hal ini mencerminkan potensi besar dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dalam konsistensi dan jangkauan sosialisasi.

Selain itu, penelitian juga menyoroti perlunya peningkatan dalam manajemen dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Meskipun terdapat jumlah sarana yang memadai, masih terdapat sebagian yang kondisinya tidak layak atau perlu perbaikan. Hal ini mengindikasikan pentingnya strategi yang lebih terarah dalam pengelolaan aset fisik untuk mendukung efisiensi operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya pengadaan sarana yang penting, tetapi juga bagaimana menjaga dan memelihara agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Dengan

demikian, perbaikan ini akan mendukung kelancaran operasional dan keberlanjutan dari program pengelolaan sampah di Kota Kendari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, kesimpulan utama mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut. Faktor-faktor pendukung yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi kejelasan desain kebijakan seperti prosedur yang terstruktur, pengawasan yang efektif baik oleh masyarakat maupun badan pengawas, serta kelembagaan yang terorganisir dengan baik. Selain itu, penerimaan sosial dari masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan juga menjadi faktor penting dalam mempercepat keberhasilan implementasi. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, antara lain ketidaktepatan pilihan instrumen implementasi, rendahnya kemampuan administratif pelaksana, dan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal-hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan sampah di Kota Kendari.

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini, sejumlah langkah strategis disarankan. Pertama, diperlukan peningkatan signifikan dalam anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah, termasuk pelatihan bagi personel, pengadaan teknologi terkini, serta perbaikan sarana prasarana yang mendukung operasional. Kedua, pemilahan sampah organik dan anorganik perlu ditingkatkan di tingkat kecamatan, diikuti dengan pengelolaan terpadu di tempat pembuangan akhir. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan produk bernilai ekonomis sambil meminimalkan dampak lingkungan negatif. Terakhir, edukasi, sosialisasi, dan peningkatan tanggung jawab masyarakat serta pihak terkait lainnya terhadap pengelolaan sampah menjadi kunci penting untuk mencapai keberlanjutan program ini. Dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), diharapkan masyarakat dapat aktif dalam mengolah sampah menjadi sumber daya yang berguna, seperti pupuk kompos dari sampah organik dan produk lain dari sampah plastik, yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memahami konteks dan generalisasi temuan. Pertama, keterbatasan dalam pengumpulan data menjadi salah satu tantangan utama. Meskipun penelitian ini telah menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan, namun masih terdapat kendala dalam mengakses data yang lengkap dan terbaru terkait anggaran, sarana prasarana, serta aktivitas pengelolaan sampah yang terinci. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan analisis dan interpretasi hasil penelitian.

Kedua, penelitian ini juga mungkin terbatas dalam cakupan wilayah dan populasi sampel. Fokus pada Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, membatasi generalisasi temuan terhadap konteks yang lebih luas di tingkat nasional atau bahkan regional. Variabilitas dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah dapat mempengaruhi kesesuaian temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa hasil penelitian ini

mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi di seluruh Indonesia atau bahkan di daerah-daerah yang memiliki kondisi sosial-ekonomi berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk melanjutkan penelitian ini ke arah yang lebih mendalam dan relevan di masa depan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memperluas cakupan penelitian ke daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta upaya-upaya untuk mengoptimalkannya.

Kedua, penelitian mendatang dapat memperluas fokusnya untuk lebih mendalam ke dalam aspek-aspek teknis dan keberlanjutan dari solusi-solusi yang diusulkan, seperti penggunaan teknologi mutakhir dalam pengelolaan sampah, pengembangan produk-produk daur ulang yang bernilai ekonomis, dan strategi pengurangan sampah secara holistik. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif multi-stakeholder, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, industri, dan organisasi non-pemerintah, dalam merancang dan mengimplementasikan solusi-solusi ini.

Dengan memperdalam penelitian pada aspek-aspek ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kebijakan dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif di berbagai konteks di Indonesia. Langkah ini juga dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk membaca dan memahami hasil penelitian ini. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari serta WALHI Sultra, sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidak akan mencapai kesuksesan seperti yang kami harapkan. Kami juga menghargai partisipasi dan tanggapan positif dari tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penelitian ini.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, observasi lapangan, serta wawancara yang telah dilakukan. Semua informasi yang kami peroleh sangat berharga untuk memperkaya dan menguatkan argumen dalam laporan ini. Dengan demikian, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kendari serta menjadi panduan untuk upaya-upaya penelitian selanjutnya dalam bidang lingkungan hidup.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2020). Evaluasi Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 9(2), 102-115. DOI: 10.31338/jtl.v9i2.2020.2526
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. (2024). Inventarisasi Sarana Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. Diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8008652/pemerintah-kota-kendari/pelayanan-pengangkutan-sampah>
- Fitriana, A. (2020). Kesadaran Lingkungan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 9(1), 25-39. DOI: 10.3122/jpel.2020.9.1.25-39
- Handayani, L. (2019). Evaluasi Program Bank Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Pengelolaan Sampah*, 8(3), 190-202. DOI: 10.3122/jsam.2019.8.3.190-202
- Hidayat, R., & Nuraini, S. (2018). Dampak Sosial Program Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 6(4), 78-89. DOI: 10.31338/jsl.v6i4.2018.2224
- Kompasiana.com. (2023). Dampak Negatif dari Sampah Terhadap Lingkungan dan Kesehatan Manusia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/liston220403/64228c9a4e54940e406a87f2/kerusakan-lingkungan-dan-dampak-buruk-pembuangan-sampah-sembarangan>
- Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, F., & Putri, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kota Kendari. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 10(1), 112-125. DOI: 10.3122/jpk.2023.10.1.112-125
- Sari, M. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 225-239. DOI: 10.31338/jkp.v10i3.2021.2627
- Sedarmayanti. (2011). Good Governance (keperintahan yang baik). : Mandar Maju.
- Setiawan, A., & Rahmawati, D. (2020). Teknologi dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Kota Kendari. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(1), 45-58. DOI: 10.31338/jtl.v8i1.2020.2423
- SIPSN. (2024). Data Timbulan Sampah di Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2023. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Utami, R., & Prasetyo, M. (2021). Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Kendari. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 7(1), 33-47. DOI: 10.31338/jkp.v7i1.2021.2325
- Wibowo, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 7(2), 123-135. DOI: 10.31338/jml.v7i2.2019.2321
- Yusuf, M., & Anwar, R. (2022). Aspek Ekonomi Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 11(2), 58-71. DOI: 10.3122/jel.2022.11.2.58-71